

MEMULAI DIALOG ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH DENGAN DATA TERBUKA:

PEMBELAJARAN DARI SEKTOR PENDIDIKAN
DI KOTA BANDA ACEH, INDONESIA



MAKALAH PEMBELAJARAN

20 Agustus 2015

Ringkasan

Keterbukaan Informasi Publik – KIP (*Freedom of Information*) dan data terbuka adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta memberikan kuasa kepada masyarakat. Perbedaannya, KIP tradisional bersifat reaktif dan bergantung kepada permintaan informasi dari masyarakat, sedangkan data terbuka bersifat proaktif, di mana pemerintah secara sukarela dan konsisten mempublikasikan *dataset* penting dalam format terbuka.

Selain itu, data terbuka merupakan ide yang relatif baru, sementara kerangka kerja dan hukum KIP biasanya sudah lebih mapan. Meskipun demikian, di banyak negara, hak KIP seringkali tidak digunakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya adalah di provinsi Aceh, Indonesia. Walaupun pemerintah sudah menunjuk pegawai untuk melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat dan memfasilitasi permohonan KIP, pemerintah provinsi hanya menerima 22 permohonan KIP di tahun 2014. Sementara itu, di Kota Banda Aceh, hanya menerima 40 permohonan KIP pada periode yang sama .

Makalah ini merangkum bagaimana Open Data Lab Jakarta (Web Foundation) bekerja sama dengan GeRAK Aceh dan Program Kinerja USAID¹ mendorong peningkatan permintaan informasi di sektor pendidikan dengan menggunakan data terbuka – publikasi *dataset* pemerintah secara proaktif dalam format yang dapat digunakan dengan bebas dan dibaca mesin (*machine-readable*). **Kunci keberhasilannya adalah proses partisipatif dari bawah di mana kelompok-kelompok kepentingan (termasuk media, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil) mengidentifikasi *dataset* yang mereka butuhkan, ditambah dengan kerja sama erat dengan pemerintah untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk mempublikasi data tersebut.** Pendekatan ini, kami sebut sebagai “data responsif”, berbeda dengan model berbasis permohonan KIP semata dan dengan beberapa model data terbuka yang sangat digerakkan oleh penyedia. Potensi pendekatan “data responsif” ini perlu digali lebih lanjut dalam konteks dan sektor lainnya.

Laporan ini ditulis oleh Michael Cañares dan Andreas Pawelke.

Saran, analisis, dan bantuan diberikan oleh Anne Jellema, Dillon Mann, dan Bhanupriya Rao. Kami juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi pada program ini secara keseluruhan.

¹ Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mitra-mitra kami dalam proyek ini, kunjungi <https://twitter.com/gerakaceh> (GeRAK Aceh) dan <http://www.kinerja.or.id/> (Kinerja USAID).

1. Latar Belakang

Konsep data terbuka semakin mendapat dukungan di seluruh dunia sebagai bentuk publikasi data yang dimiliki oleh badan publik secara proaktif. Para advokat data terbuka meminta pemerintah untuk secara aktif mempublikasikan data dalam format yang dapat dibaca mesin² dan dalam bentuk lisensi terbuka.³ Data ini kemudian dapat digunakan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa pemerintah sudah transparan dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Gagasan untuk menjadikan data ‘terbuka secara *default*’ merupakan tantangan bagi budaya kerahasiaan negara dan permintaan data agar data diperlakukan sebagai sumber daya publik, tersedia untuk mendukung partisipasi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat inovasi dan kewirausahaan. Agar dampaknya dapat berkelanjutan, penyediaan data terbuka harus diimbangi dengan permintaan dan penggunaan informasi yang sehat oleh masyarakat.

Seperti halnya di atas, KIP memberikan hak kepada masyarakat untuk memohon informasi publik kepada pemerintah. Akan tetapi, model KIP biasanya bergantung pada “publikasi reaktif”, di mana pegawai pemerintah menunggu permohonan dari masyarakat sebelum mempublikasikan informasi. Para pendukung KIP mencatat bahwa praktek ini menjamin agar pemerintah menyediakan informasi bernilai tinggi dalam menanggapi permintaan masyarakat. Terlebih lagi, klausa “pembukaan secara proaktif”, yang memandatkan pemerintah untuk secara proaktif menyediakan informasi publik, telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi, termasuk Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁴ Hal ini dapat membuat arsitektur informasi menjadi lebih efisien dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam pencarian dan penyediaan informasi yang diajukan oleh masyarakat.

Setelah pemerintah pusat mengesahkan UU KIP, pemerintah provinsi Aceh menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 23 kabupaten. Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan dukungan program Kinerja USAID, melakukan investasi yang signifikan dalam mengembangkan kerangka peraturan, menetapkan prosedur operasi standar, pelatihan PPID dan mengadakan kampanye kesadaran publik. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan, masyarakat tetap jarang meminta informasi publik, di mana jumlah permohonan KIP yang diajukan di kota atau provinsi pada tahun 2014 tidak mencapai 100 permintaan.⁵

Kami berupaya untuk mencari tahu penyebabnya dan kami mengidentifikasi dua hambatan utama:

- Tantangan terkait Wewenang dan Kapasitas: Beberapa pegawai merasa bahwa rangkain proses yang harus dilakukan kurang jelas, dan tanggung jawab KIP tidak didefinisikan secara jelas dalam deskripsi pekerjaan. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa kecepatan dan kemauan untuk menanggapi

² *Machine-readable* berarti bahwa data tersedia dalam format yang dapat dibaca oleh komputer. Format tersebut adalah JSON, RDF, XML atau CSV. Untuk mendapatkan rincian tentang format-formal file ini silakan kunjungi <http://opendatahandbook.org/guide/en/appendices/file-formats/>

³ *Open license* berarti bahwa data dapat digunakan kembali oleh pengguna yang memiliki akses. Lisensi paling umum yang dapat digunakan kembali adalah *Creative Commons*. Lihat misalnya <http://creativecommons.org/>

⁴ Sumber: <http://www.right2info.org/resources/publications/laws-1/Indonesia-Public-Information-Disclosure-Act-2008.doc/view>

⁵ Pemerintah provinsi menerima 22 permintaan FOIA offline pada tahun 2014. 40 permintaan diajukan kepada pemerintah kota Banda Aceh.

1. Latar Belakang

permohonan KIP di kantor-kantor pemerintah sangat bervariasi.

- Kesadaran: Mayoritas organisasi masyarakat sipil, media dan perwakilan akademisi yang kami tanyai belum memiliki kesadaran mengenai hak mereka untuk mengajukan permohonan KIP kepada pemerintah. Mereka yang paham mengenai haknya, sebagian besar, tidak yakin mengenai caranya, atau kepada kantor mana permohonan KIP ditujukan.⁶

Kami juga melakukan analisa tentang kondisi data terbuka di Banda Aceh. Temuan kami menyimpulkan bahwa publikasi data pemerintah secara proaktif dalam format yang dapat dibaca mesin dan lisensi terbuka di Banda Aceh hampir tidak ada. Sewaktu kami mulai bekerja, tidak ada dataset yang tersedia sebagai data yang benar-benar terbuka, dan tidak ada kebijakan atau *roadmap* untuk membuka data pemerintah. Walaupun beberapa data tersedia untuk publik, seringkali data tersebut tersedia dalam bentuk agregat (misalnya data berupa ringkasan tanpa rincian spesifik) dan tidak dapat dibaca mesin (misalnya dalam format PDF).

Terlebih lagi, sejarah Aceh yang kompleks dan penuh gejolak⁷ menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan antara kelompok masyarakat sipil dan pemerintah.⁸ Masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap sumber informasi resmi pemerintah, dan sebaliknya, beberapa pegawai pemerintah masih merasa khawatir mengenai dampak yang ditimbulkan apabila mereka berkomunikasi secara lebih terbuka.

Akan tetapi, Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Bersama organisasi masyarakat sipil setempat, GeRAK Aceh dan Program Kinerja USAID, kami bekerja sama dengan komisi informasi setempat untuk mengetahui apakah data terbuka dapat memperbaiki penyerapan dan pelaksanaan KIP.⁹

Kami bersepakat bahwa sektor pendidikan harus menjadi fokus awal. Kelompok-kelompok kepentingan - seperti media lokal, organisasi masyarakat sipil dan peneliti - sudah menyuarakan keinginan mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggerak performa setiap sekolah, agar mereka dapat merancang intervensi yang lebih efektif.¹⁰ Kualitas guru, infrastruktur sekolah, lingkungan belajar, dan tingkat pendanaan sekolah merupakan faktor-faktor yang dirasa dapat mempengaruhi performa. Kelebihan lainnya, *Kinerja* memiliki banyak pengalaman di sektor pendidikan.

⁶ Dari 19 organisasi yang kami libatkan, hanya lima organisasi yang pernah mengajukan permintaan informasi.

⁷ Sumber: http://www.ari.nus.edu.sg/wps/wps10_138.pdf

⁸ Sumber: https://www.internews.org/sites/default/files/resources/InternewsEU_ASEAN_FoE_and_RTI_Study_2014.pdf

⁹ Dalam sisa makalah ini, kami menggunakan istilah 'tim proyek' untuk merujuk kepada para individu dari Open Data Lab Jakarta, Kinerja dan GeRAK Aceh yang bekerja sama dalam proyek ini.

¹⁰ Dalam sisa makalah ini, kami menggunakan istilah "kelompok kepentingan" untuk mewakili bauran organisasi masyarakat sipil lokal, lembaga media dan para individu yang turut serta dalam proyek ini.

2. Apa yang ingin kami capai?

Kami bermaksud untuk menyelidiki dan membangun keterkaitan antara KIP dan data terbuka, antara sisi reaktif dan proaktif dari publikasi informasi, sekaligus untuk membuat model acuan inisiatif data terbuka di masa mendatang, terutama dalam konteks keterbatasan minat, kapasitas, dan sumber daya pemerintah untuk secara proaktif dapat mempublikasikan data yang tersedia. Melalui uji coba di sektor pendidikan, kami ingin menciptakan landasan untuk mencapai tata kelola dan hasil yang lebih baik di sektor penting ini.

Gambar 1. Peserta lokakarya menganalisis data terbuka pendidikan dan membuat visualisasi online dan offline dari temuan mereka.



3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

Program ini dirancang sebagai intervensi penelitian tindakan (action research) - yang berarti bahwa selain mengumpulkan informasi, tim program juga membekali dan mendukung para mitra dalam setiap proses kegiatan. Lebih penting lagi, kami juga memandang hal ini sebagai kesempatan belajar yang berharga dan bertujuan untuk memperbaiki pemikiran dan pendekatan kami seiring dengan pelaksanaannya. Kami mengambil langkah-langkah berikut:

3.1 MEMAHAMI KEBUTUHAN MASYARAKAT

Program ini dimulai dengan identifikasi masalah, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai pemangku kepentingan secara mendalam - langkah awal dalam perancangan sebuah model untuk keterlibatan responsif. Termasuk di dalamnya, memahami jenis data yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan hasil pendidikan.

Dataset pendidikan utama yang diidentifikasi sebagai prioritas untuk dibuka oleh kelompok-kelompok kepentingan adalah sebagai berikut:

Peringkat	Kategori Data	Kebutuhan Data Prioritas
1	Performa Sekolah	Hasil ujian, performa dalam kompetisi, tingkat penerimaan
2	Fasilitas Sekolah	Fasilitas/prasarana, akreditasi, alamat, status negeri/swasta
3	Profil Sekolah	Staf Manajemen, peraturan sekolah, kurikulum per level
4	Profil Siswa	Jumlah siswa (laki-laki, perempuan), rasio guru-siswa
5	Status Perpustakaan	Ada/tidak adanya perpustakaan, jumlah koleksi, jumlah kunjungan
6	Staf Pengajar	Jumlah staf pengajar, pendidikan, status pekerjaan, kualifikasi, distribusi
7	Staf Non-Pengajar	Jumlah staf non-pengajar, status pekerjaan, kualifikasi
8	Pendanaan Sekolah	Rencana anggaran, laporan pengeluaran, daftar penerima beasiswa
9	Profil Pendanaan	Sumber pendanaan

Tabel 1. . Kebutuhan Data Pendidikan yang Diprioritaskan - Kota Banda Aceh

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

Tampak jelas bahwa kelompok kepentingan menginginkan data pendidikan yang akan menginformasikan mereka mengenai cara pemerintah membelanjakan dana publik untuk mencapai hasil pendidikan. Mereka ingin mengetahui tingkat investasi di bidang pendidikan dan sumber daya manusia, kebijakan dan praktek pendidikan, dan sumber-sumber serta penggunaan dana pendidikan.

Berapa jumlah perpustakaan dan laboratorium di setiap sekolah?

Apa kredensial para stafnya? Berapa rasio siswa-guru?

Berapa banyak anggaran yang diberikan kepada masing-masing sekolah dan bagaimana cara mereka mengalokasikan anggaran tersebut?

Dan apa hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan performa sekolah dan siswa?

Dengan memprioritaskan dataset tersebut, kemungkinan besar masyarakat dapat menggunakannya untuk mendorong perubahan. Hal ini sekaligus menghindari biaya yang terkait dengan penyediaan *dataset* yang tidak bernilai bagi masyarakat.

3.2. MENDUKUNG PEMERINTAH DALAM MEMBUKA DATA

Bersamaan dengan proses konsultasi, kami bekerja dengan para pegawai di Dinas Pendidikan untuk memahami proses pengelolaan data dan publikasi data reaktif yang sudah diterapkan. Proses ini juga membantu untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang muncul di masa mendatang terkait dengan publikasi data secara proaktif serta upaya peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil setempat dalam bidang data terbuka.

Daftar dataset yang diprioritaskan oleh kelompok kepentingan (lihat Tabel 1 di atas) kemudian disampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk didiskusikan apakah dan bagaimana *dataset* tersebut dapat dipublikasikan sebagai data terbuka. Walaupun awalnya skeptis, pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh, setelah menghadiri serangkaian presentasi dari tim program dan saran dari pemerintah provinsi Jakarta, akhirnya menyadari nilai data terbuka sebagai penghubung yang diperlukan untuk mencapai pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. Pada akhirnya, para pegawai pemerintah menyambut baik dan berkomitmen untuk membuka data.

Akan tetapi, pencapaian ini bukan tanpa tantangan. Pegawai pemerintah pada awalnya merasa khawatir untuk secara proaktif mempublikasikan data dalam format terbuka karena berbagai alasan. Pertama, mereka menyamakan keterbukaan data dengan keterbukaan informasi publik, mereka meyakini bahwa akses informasi dalam bentuk dokumen PDF sudah bisa dianggap sebagai data terbuka. Saat tim program memberi saran bahwa data seharusnya tersedia dalam bentuk format terbuka agar 'mudah' digunakan kembali, muncul kekhawatiran mengenai kurangnya keterampilan teknis di kalangan pegawai

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

pemerintah untuk menghasilkan data tersebut.

Selain itu, pegawai pemerintah merasa khawatir bahwa mempublikasikan data dalam format yang disarankan akan menghilangkan kendali pemerintah untuk melacak pihak-pihak yang menggunakan dan tujuan penggunaan data tersebut. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pegawai pemerintah, permohonan KIP memudahkan pelacakan pengguna yang meminta informasi publik tersebut, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan apabila data dibuka sepenuhnya. Mereka juga merasa takut apabila data terbuka dapat disalahgunakan oleh pengguna, sehingga lebih memilih untuk mempublikasikan data dalam format PDF.

Walaupun demikian, para pegawai pemerintah memahami alasan dan manfaat yang dapat diperoleh jika data pemerintah disediakan untuk publik. Mereka berkomitmen untuk membuka *dataset* pendidikan sesuai dengan prioritas yang diidentifikasi melalui portal data terbuka yang dikembangkan dengan dukungan dari tim program.¹¹ **Sebanyak 16 dataset dipublikasikan secara online oleh Dinas Pendidikan untuk memenuhi daftar kebutuhan prioritas kelompok kepentingan.**¹² Sebagai hasil tambahan, dipublikasikannya 8 *dataset* oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yang muncul dari ketertarikan untuk menguji kemampuan publikasi data terbuka serta menyediakan informasi kepada masyarakat.

Gambar 2. Perwakilan dari pemerintah DKI Jakarta menunjukkan praktek-praktek dan inisiatif data terbuka mereka kepada pejabat Pemerintah Kota Banda Aceh, sebagai bagian dari lokakarya peningkatan kapasitas.



¹¹ Sumber: <http://data.bandaacehkota.info/>

¹² Informasi ini tersedia di <http://data2.bandaacehkota.info/group/disdikpora-banda-aceh>

3. Apa yang kami lakukan? Dan apa yang kami temukan?

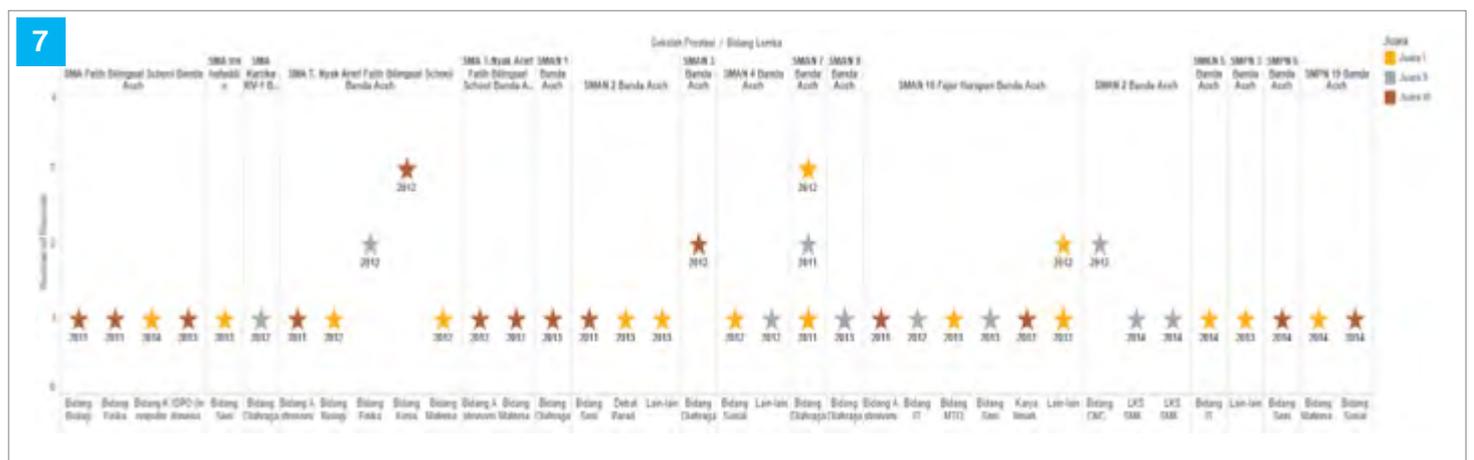
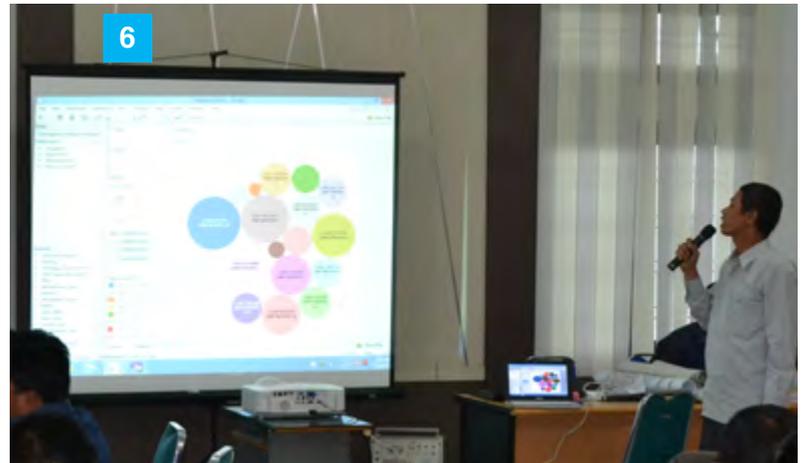
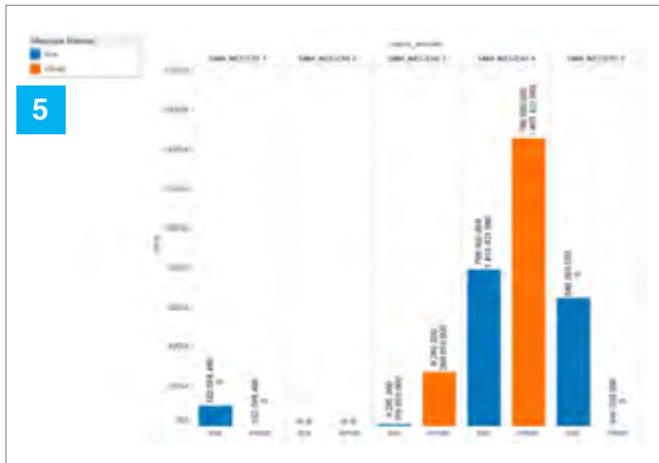
3.3. MELATIH PENGGUNA UNTUK MENGUBAH DATA MENJADI INFORMASI

Ketiga, tim program memperkuat kapasitas pengguna potensial data untuk memahami, menganalisis, dan menerjemahkan data pemerintah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti sekaligus untuk berperan sebagai perantara data atau informasi antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, kami kembali berkonsultasi dengan kelompok-kelompok kepentingan di langkah pertama, dan mengadakan serangkaian lokakarya dan praktek langsung dengan menggunakan data yang baru dipublikasikan.

3.4. KOMUNIKASI DUA ARAH

Terakhir, program memberi ruang bagi kelompok kepentingan dan pemerintah untuk mendiskusikan masalah dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh data yang sudah dianalisis.

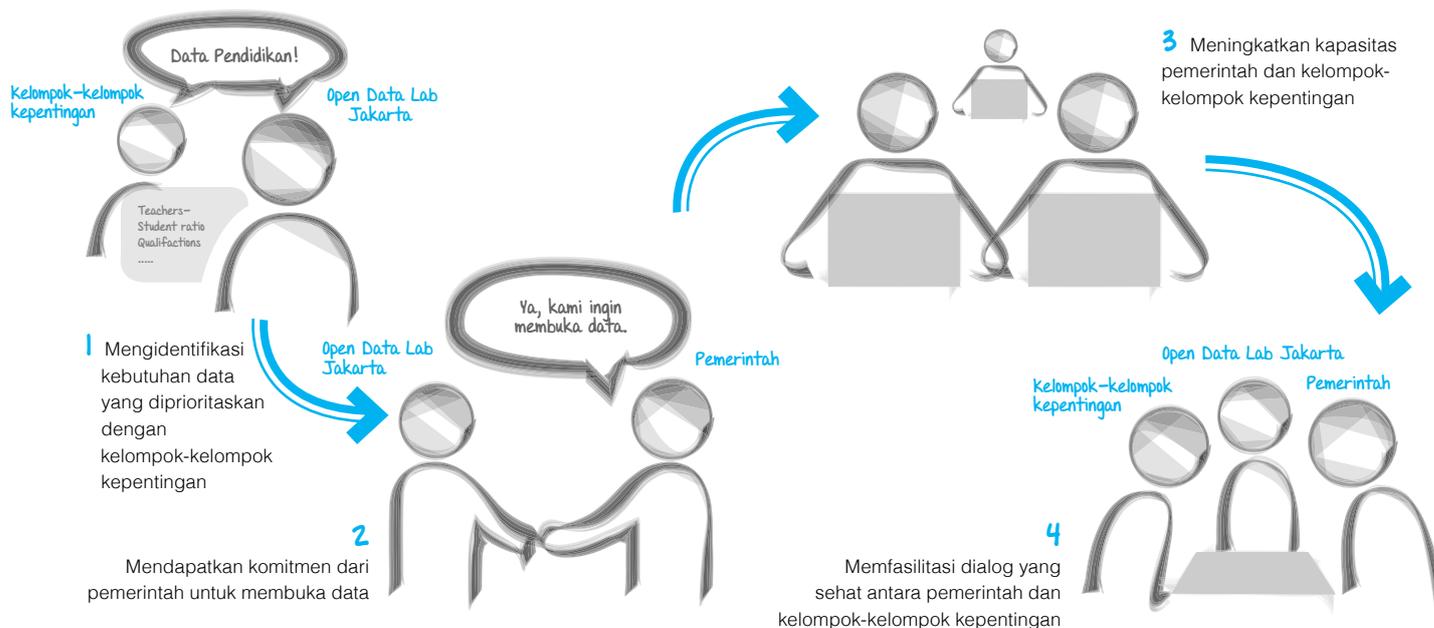
Dalam acara diskusi publik, kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam program mempresentasikan hasil latihan analisis dan visualisasi data. **Hal ini memungkinkan kelompok tersebut untuk mengungkapkan isu-isu penting dengan Dinas Pendidikan mengenai penggunaan dana dan performa sekolah, serta persoalan lainnya. Sabaliknya, kegiatan ini juga memungkinkan pegawai dari Dinas Pendidikan untuk memahami isu-isu tersebut dari perspektif masyarakat terdidik.** Misalnya, beberapa sekolah diidentifikasi sebagai sekolah dengan pendanaan yang relatif mencukupi, tetapi performanya tidak sebaik yang diharapkan. Sekolah-sekolah ini dipilih untuk penyelidikan lebih lanjut. Hasil identifikasi lainnya adalah bahwa ada beberapa sekolah yang berhasil meningkatkan hasil belajar tanpa menggunakan dana khusus yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur. Para pegawai Dinas Pendidikan berupaya untuk mencari tahu penyebabnya dan memberikan informasi berkaitan dengan penyelidikan tersebut. Sementara itu, tim Open Data Lab Jakarta (Web Foundation) akan melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk membuat inisiatif data terbuka yang berkelanjutan.



Gambar 3. Perwakilan kelompok masyarakat sipil menyajikan visualisasi data offline mengenai kinerja sekolah berdasarkan lokasi; **Gambar 4.** Visualisasi data dari rata-rata penghargaan yang dimenangkan oleh sekolah setiap tahun ajaran; **Gambar 5.** Visualisasi online dari anggaran dan pengeluaran untuk fasilitas sekolah di salah satu daerah di Banda Aceh; **Gambar 6.** Perwakilan kelompok masyarakat sipil menyajikan visualisasi data online mengenai jumlah dan sumber pendanaan sekolah; **Gambar 7.** Visualisasi online mengenai performa sekolah berdasarkan penghargaan yang dimenangkan.

4. Apa yang kami pelajari?

Model partisipasi seperti ini, yang kami sebut sebagai '**Model Data Terbuka Responsif**', berbeda dengan penyediaan data terbuka yang didorong oleh pemerintah (*supply-driven*) dan proses KIP murni didorong oleh permohonan masyarakat (*demand-driven*). Model ini menekankan bahwa proses penyediaan data secara proaktif berdasarkan kebutuhan masyarakat dan bukan semata berdasarkan keinginan pemerintah untuk menyediakan data.



Gambar 1. Model Data Terbuka Responsif yang dikembangkan dan diujicobakan di Kota Banda Aceh

Salah satu hasil utama program yaitu menunjukkan potensi data terbuka kepada kelompok-kelompok kepentingan. Jika kelompok tersebut menyadari bahwa mereka bisa mendapatkan data mentah dalam format terbuka dari pemerintah, pencapaian ini dipandang sebagai kemajuan yang signifikan. Kegiatan pelatihan yang diadakan oleh tim program mengajarkan mereka mengenai relevansi data dalam pekerjaan mereka, beberapa alat untuk menganalisisnya dan cara terbaik menggunakan data untuk mencapai tujuan serta membina hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah juga dipandang sebagai keuntungan yang signifikan.

Acara diskusi publik di mana Organisasi Masyarakat Sipil mempresentasikan temuan-temuan mereka dari data yang dipublikasikan dipenuhi ketegangan dan ketertarikan. Perwakilan pemerintah pada awalnya bersikap defensif, tetapi dengan berfokus pada data dan apa yang ditunjukkan oleh data, debat yang bersifat konfrontatif berubah menjadi diskusi positif mengenai keprihatinan bersama terhadap hasil pendidikan dan masa depan Kota Banda Aceh. Saat pertemuan tersebut ditutup, suasana berubah dari konfrontatif ke konstruktif, dan pemahaman bersama yang lebih baik mengenai kekhawatiran, kapasitas dan prioritas semua pihak berhasil dicapai.

Penyedia dan pengguna data menganggap hubungan antara KIP dan data terbuka sangat penting untuk mencapai partisipasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Mengintegrasikan format terbuka ke KIP, serta penyediaan data secara proaktif oleh pemerintah, menciptakan

4. Apa yang kami pelajari?

aliran informasi yang lebih baik dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Selama berlangsungnya program, perwakilan dari kelompok kepentingan dan pegawai pemerintah kota mulai memandang unsur-unsur ini sebagai dua sisi dari koin transparansi. Dengan lebih menekankan pada unsur kepercayaan dari transparansi, peserta meringkas pemahaman mereka mengenai manfaat data terbuka untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai berikut:

“Melalui data terbuka, masyarakat dapat mengakses informasi tanpa terkecuali, mendorong tata kelola pemerintahan yang terbuka dan baik, masyarakat dapat secara aktif memantau dan berpartisipasi. Oleh karena itu, masyarakat tidak selalu mengkritik pemerintah mereka, melainkan memberikan umpan balik yang konstruktif.”

Perspektif ini juga dianut oleh pegawai pemerintah kota. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menekankan pentingnya mewujudkan sifat komplementer UU KIP dan data terbuka untuk memperjuangkan transparansi pemerintah yang lebih besar dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Gambar 8. Bekerja sama – anggota berbagai organisasi masyarakat sipil dari Banda Aceh, bersama dengan staf dari Kinerja USAID menganalisis data dan merencanakan tindakan-tindakan berkelanjutan selama acara diskusi publik.



5. Apa pelajaran utama yang dapat dipetik?

Pengalaman dari program di Kota Banda Aceh ini menunjukkan bahwa keberhasilan mengintegrasikan KIP dan data terbuka untuk kemajuan reformasi pendidikan sangat tergantung pada upaya kolektif pemerintah, kelompok kepentingan, dan masyarakat - penyedia, wirausaha, dan konsumen data dan informasi. Tanpa penyediaan dan penggunaan data, inisiatif data terbuka tidak akan berkelanjutan, dan tanpa tindakan pemerintah untuk merespon tuntutan masyarakat, partisipasi akan menurun karena masyarakat merasa dikecewakan.

Pelajaran

1

‘Model Data Terbuka Responsif’ yang mengutamakan *dataset* berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh kelompok kepentingan, berguna dalam melembagakan penyediaan data pendidikan dan data pemerintah lainnya secara proaktif, dalam konteks di mana data belum terbuka secara *default*.

Di beberapa negara, salah satu pendekatan yang dipakai adalah dengan membuka semua dataset pemerintah sebanyak-banyaknya. Di negara-negara yang memiliki masyarakat sipil yang aktif, terampil serta partisipatif dan di mana *dataset* yang dikeluarkan disertai kegiatan stimulasi permintaan yang berkelanjutan, cara ini telah terbukti berhasil. Akan tetapi di negara-negara lain, hal ini menjadi kegagalan yang menyebabkan kerugian signifikan. Banyak pemerintah sudah berinvestasi dalam pembangunan portal data terbuka dan mempublikasikan data – dan ternyata data tersebut tidak terpakai, sehingga ketertarikan masyarakat sipil dan pemerintah menurun dengan cepat.

‘Model Data Terbuka Responsif’ dapat digunakan sebagai batu loncatan yang berguna untuk menunjukkan manfaat dan dampak data terbuka, bahkan memungkinkan scale-up secara cepat menjadi model ‘terbuka secara *default*’. Model ini memungkinkan partisipasi yang lebih tinggi, mulai dari awal, antara pemerintah dan kelompok kepentingan, sehingga menghasilkan pengeluaran *dataset* yang berharga dan relevan, serta proses pembuatan kebijakan yang lebih responsif dan dapat memberikan dampak positif. Jika model seperti ini dapat memanfaatkan peraturan KIP yang ada, implementasi dapat berjalan dengan relatif cepat dan efisien.

Seperti yang disampaikan oleh seorang jurnalis dalam salah satu kegiatan lokakarya:

“Ketiadaan partisipasi masyarakat mengurangi insentif bagi pemerintah daerah untuk membuka data. Sebagai masyarakat sipil, kita harus lebih terlibat dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi.”

5. Apa pelajaran utama yang dapat dipetik?

Pelajaran

2

Tujuan pemerintah yang tidak berhubungan secara langsung dengan transparansi dapat mendorong investasi dalam sistem dan proses yang memungkinkan data terbuka pemerintah yang relevan secara proaktif.

Pemerintah Kota Banda Aceh ingin memosisikan diri sebagai kota *cyber* di Indonesia.¹³ Oleh karena itu, pemerintah kota setuju untuk menginvestasikan sumber daya dan memperbolehkan para pegawai untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengumpulkan, menyimpan, dan memilih data dalam format terbuka, sehingga publikasi proaktif dapat menjadi kebiasaan. Dalam program ini, Pemerintah Kota Banda Aceh menggunakan [portal](#) yang didedikasikan untuk menyimpan data mereka yang dibuka secara proaktif.

Seperti yang sudah dibahas di atas, perbedaan utama antara program ini dan inisiatif data terbuka lainnya terletak pada proses pemilihan data perlu dipublikasikan. Sementara portal pemerintah lainnya mengeluarkan data yang dapat dengan mudah dibuka, Pemerintah Kota Banda Aceh secara aktif mendengarkan kebutuhan data masyarakat sebagaimana disampaikan oleh kelompok-kelompok kepentingan.

Pelajaran

3

Dengan meningkatkan penyerapan data yang ada, kita dapat mendorong permintaan akan publikasi data tambahan.

Bagi sebagian besar kelompok-kelompok kepentingan yang kami ajak bekerja sama, ini adalah pertama kalinya mereka mengenal konsep data terbuka. Setelah mereka mengetahui manfaatnya, seperti visualisasi data untuk mendukung advokasi, mereka menyadari perlunya untuk memanfaatkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah kota secara aktif dalam penelitian, kampanye, dan advokasi mereka. Hal ini tidak hanya membantu meyakinkan pemerintah bahwa investasi terhadap data terbuka bermanfaat, tetapi juga meningkatkan kesadaran publik dan ketertarikan terhadap data terbuka, mendorong masyarakat untuk meminta publikasi data lainnya.

¹³ Konsep Kota *Cyber* Banda Aceh dapat ditemukan di tautan ini: <http://www.bandaacehkota.go.id/images/dokumen/dokumen%20baicc.pdf>

5. Apa pelajaran utama yang dapat dipetik?

Pelajaran

4

Perantara data terbaik adalah pihak-pihak yang memandang data sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang jelas.

Walaupun perwakilan dari kelompok kepentingan mampu menghasilkan visualisasi data yang berarti dan narasi yang meminta Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh untuk memperbaiki kebijakan pendidikan dan praktik pembuatan anggaran daerah, sebagian besar dari mereka tidak mampu mempertahankan partisipasi dengan pemerintah kota dalam isu-isu tersebut. Salah satu alasan yang mendasari hal ini adalah fakta bahwa beberapa dari mereka tidak memfokuskan pekerjaan dan advokasi mereka terhadap reformasi pendidikan. Oleh karena itu, peserta seharusnya dipilih dengan lebih strategis dan sedemikian rupa sehingga kelompok-kelompok yang secara langsung menangani reformasi pendidikan merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam program. Dengan cara ini, penggunaan data dan partisipasi dengan pemerintah dapat menjadi berkelanjutan.

Persiapan penggiat data terbuka yang efektif,¹⁴ bukan sekedar mengumpulkan berbagai organisasi dan memberikan pelatihan mengenai data terbuka - melainkan membantu organisasi-organisasi yang sudah berpartisipasi dengan pemerintah dalam isu-isu spesifik untuk meningkatkan dampaknya melalui keahlian dalam menggunakan dan menganalisis data terbuka.

Pelajaran

5

Agar memiliki akar yang kuat, data terbuka membutuhkan sumber daya yang berkelanjutan dan upaya untuk meningkatkan kapasitas pengguna.

Kelompok-kelompok pendidikan yang dilatih melalui program ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam hal partisipasi yang digerakkan oleh data, tetapi keahlian dasar yang mereka peroleh mungkin tidak cukup untuk dengan mudah menjadikan data sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Peningkatan kapasitas yang lebih berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kelompok-kelompok kepentingan untuk meminta informasi, menuntut format terbuka dan perizinan data, menggunakan dan menyebarkan data tersebut untuk menghasilkan dampak yang lebih luas.

¹⁴ Lihat di sini untuk diskusi mengenai peran perantara data terbuka: <http://www.opendataresearch.org/dl/symposium2015/odrs2015-paper8.pdf>

6. Area untuk penelitian masa depan

Program ini bertujuan untuk menghubungkan data terbuka dan KIP dengan menyediakan jalur alternatif bagi masyarakat untuk mengakses data pemerintah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai keberadaan dan nilai *dataset* yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan membuka peluang untuk menggunakannya.

Tujuan program bukan untuk memecahkan rendahnya *volume* permohonan KIP, melainkan untuk membangun praktik keterbukaan informasi berkelanjutan yang menangani dan mencocokkan kebutuhan dan penyediaan antara masyarakat sipil dan pemerintah, terutama dalam konteks di mana kepercayaan dan komunikasi antara masyarakat dan negara tidak terlalu baik; mekanisme KIP tidak jelas, misalnya masyarakat dialihkan dari satu kantor ke kantor yang lain ketika mereka meminta data, dan penggunaan bukti dan data untuk memberikan informasi tentang perdebatan kebijakan publik tidak meluas. Proses ini diharapkan dapat membuat tata kelola pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan pengalaman kami di Kota Banda Aceh, kami ingin melihat apakah inisiatif data terbuka yang partisipatif juga dapat diterapkan di daerah-daerah lain untuk secara langsung meningkatkan penyerapan informasi pemerintah dan memfasilitasi dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Di Afrika, misalnya, paling sedikit satu di antara empat orang yang disurvei oleh Afrobarometer di tahun 2014/15 merasa bahwa anggota dewan pemerintah daerah mendengarkan mereka.¹⁵ Setelah peristiwa Angin Topan Katrina di New Orleans, *Code for America* menemukan bahwa kunci untuk meningkatkan dampak data terbuka bukanlah “membuat aplikasi keren” melainkan menciptakan “komunikasi yang lebih produktif ... antara masyarakat yang marah dan frustrasi di satu sisi, dan kota yang lumpuh di sisi lain.”¹⁶

Kami memiliki dua hipotesis tambahan yang belum diuji tetapi ada baiknya jika diteliti lebih lanjut di masa depan.

- Pertama, **kami masih perlu menguji apakah penyediaan data pemerintah secara proaktif dapat secara tidak langsung meningkatkan penggunaan mekanisme KIP karena lebih banyak pihak akan mengetahui tentang jenis data yang dimiliki oleh pemerintah dan manfaatnya bagi mereka.**
- Kedua, **kita masih perlu menyelidiki apakah mengekspos instansi pemerintah terhadap inisiatif data terbuka juga dapat membuat tanggapan mereka terhadap permohonan KIP menjadi lebih efisien dan bermanfaat**, karena inisiatif data terbuka membantu untuk mengatasi beberapa kekhawatiran mereka mengenai penyediaan data kepada masyarakat.

¹⁵ Sumber: <http://www.afrobarometer.org/online-data-analysis/analyse-online>

¹⁶ Sumber: <http://www.fastcoexist.com/1680759/revitalizing-new-orleans-by-crowdsourcing-renewal>

6. Area untuk penelitian masa depan

Penelitian mengenai dua area ini akan membantu kita untuk secara lebih baik memahami hubungan antara publikasi data secara proaktif dan reaktif serta dampak inisiatif data terbuka terhadap hak masyarakat atas informasi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program ini, kunjungi situs kami di labs.webfoundation.org atau hubungi kami di info@labs.webfoundation.org. Sumber-sumber lainnya, seperti Panduan Pelaksanaan (How-to-Guide) kami untuk program ini dan presentasi yang membahas tentang program ini juga tersedia di bagian “Sumber” (Resources) di situs kami.

Tentang World Wide Web Foundation

World Wide Web Foundation didirikan pada tahun 2009 oleh penemu *Web*, Sir Tim Berners-Lee, untuk memajukan *Web* terbuka sebagai komoditas publik dan hak dasar. Kami berupaya untuk membangun masa depan di mana *Web* memberdayakan semua orang, di semua lokasi, untuk turut mengambil bagian dalam menciptakan dunia yang lebih adil.

Bagian dari visi kami adalah agar data - sumber kehidupan masyarakat digital - digunakan untuk kepentingan umum. Kami berupaya untuk membuka data online agar setiap orang dapat memahami dan menggunakannya untuk mengatasi masalah-masalah yang penting bagi mereka.

Tentang Open Data Lab Jakarta

Didirikan pada tahun 2014, Open Data Lab Jakarta (Web Foundation) bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah di Asia Tenggara untuk menemukan cara-cara inovatif untuk menggunakan data dalam memecahkan tantangan-tantangan masyarakat sipil. Tujuan kami adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat menggunakan data.

Lab Jakarta adalah yang Lab pertama dari serangkaian Lab yang rencananya akan didirikan di negara-negara berkembang, dan Lab di Afrika akan menyusul dalam waktu dekat.

Ucapan Terima Kasih

Program ini tidak akan terlaksana tanpa kerja sama erat dengan dan dukungan yang kuat dari mitra-mitra proyek kami, Kinerja dan GeRAK Aceh.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banda Aceh atas keterbukaan mereka untuk terlibat dalam program ini.

Terima kasih kepada organisasi masyarakat sipil, perwakilan media dan para peneliti yang memberikan waktu dan keahlian mereka untuk mengidentifikasi *dataset* yang diprioritaskan, menganalisis data, dan menghadiri pertemuan publik.

Kinerja menyediakan pendanaan bagi program ini, sementara dukungan pendanaan umum untuk Open Data Lab Jakarta diberikan oleh Ford Foundation.

Terakhir, walaupun keberhasilan kami merupakan upaya gabungan dengan rekan-rekan kerja dan mitra-mitra kami, segala ketidakakuratan atau kesalahan dalam makalah ini merupakan tanggung jawab kami.

Open Data Lab Jakarta

 labs.webfoundation.org
 [@ODLabJkt](https://twitter.com/ODLabJkt)
 info@labs.webfoundation.org

World Wide Web Foundation

 webfoundation.org
 [@webfoundation](https://twitter.com/webfoundation)
 contact@webfoundation.org

